



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS 2021-2026

Dinas Penanaman Modal
&
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Pahlawan No. 01 Kota Samarinda
Gedung Mal Pelayanan Publik 75242
www.dpmtsp.samarindakota.go.id



MAL PELAYANAN
PUBLIK



SAMARINDA
Kota Pusat Peradaban





KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang maha esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-nya, sehingga dapat menyelesaikan Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Samarinda Tahun 2021-2026.

Perubahan Rencana Strategis DPMPTSP Kota Samarinda periode 2021-2026 merupakan acuan bagi DPMPTSP dalam menyelenggarakan pelayanan penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Rencana Strategis DPMPTSP Kota Samarinda periode 2021-2026 juga merupakan upaya penyatuan persepsi dan komitmen diantara internal baik itu unsur pimpinan maupun staf tentunya harus dapat dicapai secara bersama-sama.

Berbagai kebijakan, program maupun kegiatan yang disusun dalam Perubahan Rencana Strategis DPMPTSP Kota Samarinda Tahun 2021-2026 diharapkan dapat meningkatkan kinerja DPMPTSP Kota Samarinda sebagai penyelenggara pelayanan penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan serta koordinasi dengan instansi teknis.

Sebagai bentuk perencanaan jangka menengah tentunya Rencana Startegis DPMPTSP Kota Samarinda dalam perjalanannya akan dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan yang bersifat tak terduga (*turbulence*). Untuk itu berbagai penyempurnaan baik program maupun kegiatan tentunya akan terus dilakukan yang disesuaikan dengan berbagai pengaruh tersebut baik pengaruh yang bersifat regulatif maupun bersifat konsekuensi yang harus dihadapi guna terus memaksimalkan berbagai produk perencanaan dengan kebutuhan nyata yang ada di masyarakat.

Akhirnya semoga Perubahan Rencana Strategis DPMPTSP Kota Samarinda Tahun 2021-2026 ini dapat di implementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan terwujudnya good governance.

Samarinda, 02 Agustus 2023
KAPALA DINAS

JUS MARAMDHANA ALUS, SH, M.Si
NIP. 19741030 199403 1 002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK.....	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	8
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisas Perangkat Daerah.....	8
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	9
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	14
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	20
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	22
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	22
3.2. Telahaan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .	22
3.3. Telahaan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	23
3.4. Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD	24
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.....	25
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	26
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	26
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	27
5.1. Rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah	27
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	28
6.1. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif	28
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	45
7.1. Indikator Perangkat Daerah yang Secara Langsung Menunjukkan Kinerja yang akan Dicapai Perangkat Daerah Dalam Lima Tahun Mendatang Sebagai Komitmen untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD	45
BAB VIII PENUTUP	46
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Profil Sumber Daya Manusia DPMPTSP Kota Samarinda	10
Tabel 2.2	Jumlah Personel berdasarkan Eselon/Non Eselon.....	10
Tabel 2.3	Jumlah Sarana dan Prasarana Kerja.....	11
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kota Samarinda.....	15
Tabel 2.5	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DPMPTSP Kota Samarinda Tahun 2016-2020	19
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMPTSP Kota Samarinda Tahun 2021-2026	26
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	27
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Tahun 2021-2026 DPMPTSP Kota Samarinda	32
Tabel 7.1	Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	45



DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Jumlah Personil DPMPTSP.....	10
Grafik 2.2	Jumlah Personil DPMPTSP Berdasarkan Eselon.....	12
Grafik 2.3	Jumlah Personil DPMPTSP Berdasarkan Golongan	12
Grafik 2.4	Jumlah Personil DPMPTSP Berdasarkan Tingkat Pendidikan	13



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi DPMPTSP Kota Samarinda	9
---	---



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengembangan Investasi dan Penanaman Modal Daerah di setiap Kota adalah salah satu bentuk kewenangan Pemerintah Daerah dalam mengurus dan mengatur urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal mana dimaksud telah ditetapkan didalam Undang–undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Undang–undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Sebagai pedoman dalam melaksanakan Kewenangan Daerah, Pemerintah Kota Samarinda menetapkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Walikota Samarinda Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda, dimana dijabarkan Tugas Pokok DPMPTSP Kota Samarinda adalah membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan konkuren bidang Penanaman Modal dan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan Rencana Strategis dan menyiapkan bahan koordinasi perumusan kebijakan Dinas.
2. Perumusan tujuan dan sasaran yang akan dicapai sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan.
3. Penyusunan Program kerja Tahunan Dinas dalam menyelenggarakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan Rencana Strategis Pemerintah Daerah.
4. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi rencana strategis, tujuan dan sasaran serta kerja sama, baik dalam negeri maupun luar negeri di Bidang Penanaman Modal.
5. Membantu Walikota dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas tertentu penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Penanaman Modal.
6. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
7. Pengendalian dan Pengawasan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas.



8. Pemantauan, evaluasi dan Pelaporan hasil pelaksanaan tugas Dinas kepada Walikota.
9. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional, dan
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Kewenangan atas dasar urusan Pemerintah di Bidang Penanaman Modal sebagaimana disebutkan diatas, tujuan utamanya adalah peningkatan dan pertumbuhan ekonomi di Daerah dengan sasaran pokok ialah menciptakan bangunan dasar bagi usaha Pelaksanaan Program Dan Rencana Pengembangan Investasi ke arah Pertumbuhan Iklim Dan Kerjasama Investasi di Daerah.

Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda 2021 - 2026 berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan di bidang penanaman modal, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, dengan tujuan:

1. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada Masyarakat;
2. Mendekatkan pelayanan kepada Masyarakat;
3. Memperpendek proses pelayanan;
4. Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau;
5. Memberikan akses yang lebih luas kepada Masyarakat untuk memperoleh pelayanan.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;



6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal;
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
9. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus;
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
11. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah;
12. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
20. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
21. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta



- Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Nomenklatur DPMPTSP;
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 27. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 28. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2020-2024;
 29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
 30. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025;
 31. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Urusan Pemerintahan Konkuren yang Menjadi Kewenangan Daerah;
 32. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 33. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026;
 34. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026;
 35. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 83 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan



Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda Tahun 2021 - 2026 untuk menyiapkan dokumen perencanaan sebagai pedoman/penuntun yang dapat memberikan gambaran kondisi yang akan dicapai, arah kebijakan, strategi yang diambil untuk mencapai sasaran dalam kerangka pencapaian visi dan misi, sebagai tolak ukur pertanggungjawaban Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda pada setiap akhir tahun dalam kurun waktu 5 tahun kedepan dalam upaya pengembangan investasi penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Samarinda.

Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda Tahun 2021 - 2026 bertujuan sebagai berikut:

1. Sebagai acuan dalam perencanaan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda Tahun 2021 - 2026, sehingga setiap tahapan perencanaan pembangunan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.
2. Memberikan arahan kebutuhan program dan kegiatan prioritas yang jelas hingga pelaksanaan kegiatan bisa terwujud secara efektif, efisien dan optimal.
3. Memudahkan pemahaman seluruh jajaran Manajemen dan Aparatur dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda Tahun 2021-2026 dalam melaksanakan kegiatan secara terarah, terpadu dan terukur untuk mencapai tujuan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.
4. Sebagai instrumen tolak ukur dan kendali untuk mengevaluasi/penilaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda untuk masa periode tahun 2021 - 2026.
5. Sebagai dasar komitmen bersama seluruh jajaran aparatur di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda terhadap program-program yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dalam rangka mencapai visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih di Kota Samarinda.



1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda Tahun 2021 - 2026 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 sebagai berikut :

- Bab I : **PENDAHULUAN** terdiri dari latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan
- Bab II : **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**, menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi Perangkat Daerah, sumber daya Perangkat Daerah, kinerja pelayanan Perangkat Daerah, tantangan dan peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.
- Bab III : **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**, menyajikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi, Telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD, serta penentuan isu-isu strategis
- Bab IV : **TUJUAN DAN SASARAN**, menguraikan tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.
- Bab V : **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**, berisi Rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah
- Bab VI : **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**, berisi Rencana Program dan Kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.
- Bab VII : **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**, berisi Indikator Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
- Bab VIII : **PENUTUP** merupakan penutup dari dokumen rencana strategis



dan harapan kepada semua pihak yang berkepentingan agar menjadikan renstra ini sebagai penunjuk arah dan pedoman untuk melaksanakan pembangunan periode 2021-2026

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Samarinda yaitu Melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perijinan terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a.) Perumusan kebijakan teknis di bidang perijinan secara terpadu sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- b.) Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perijinan secara terpadu.
- c.) Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pendataan dan penetapan.
- d.) Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pelayanan perijinan.
- e.) Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pengendalian dan pengawasan.

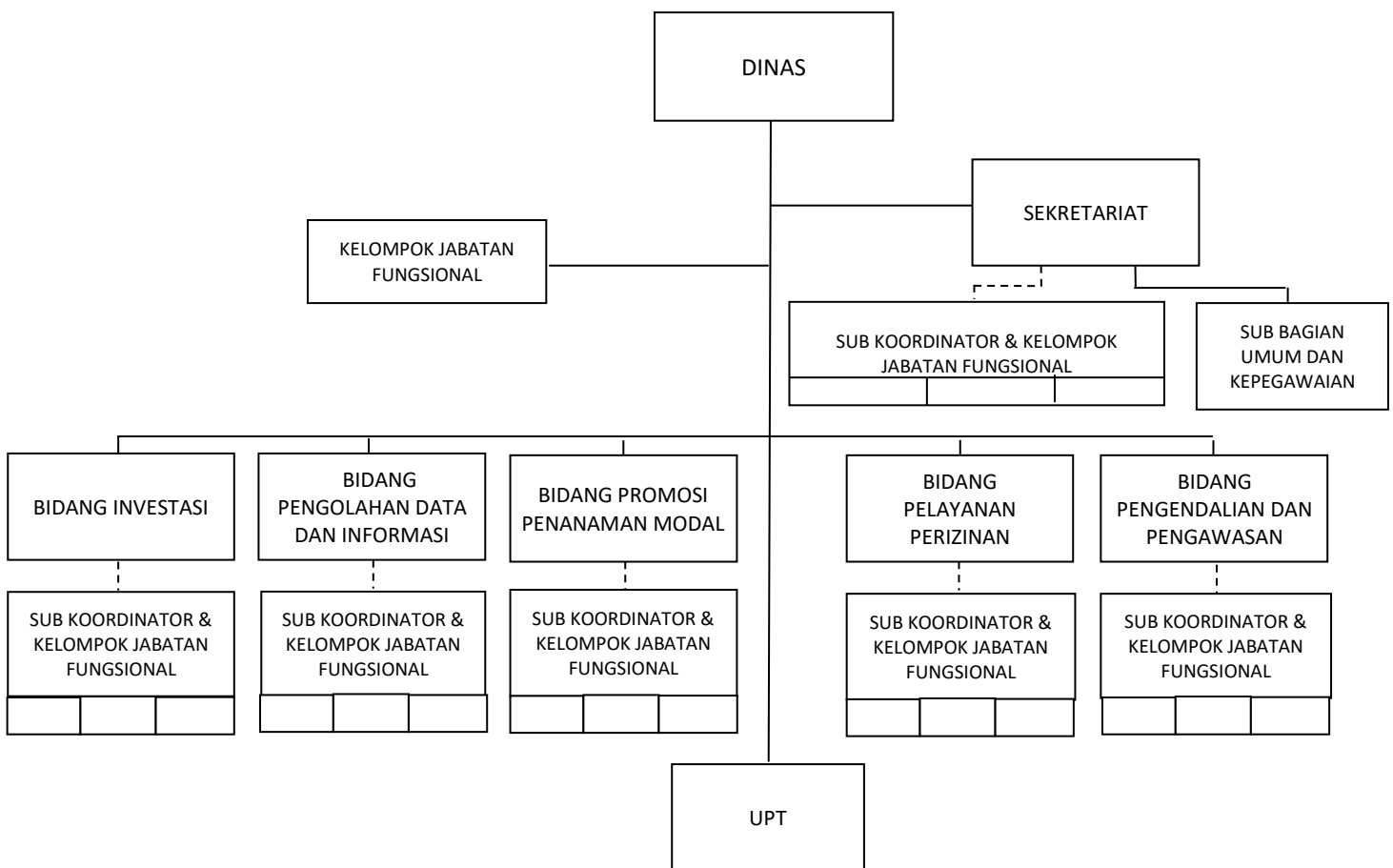
Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda sesuai dengan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 83 Tahun 2021 terdiri dari :

1. Dinas;
2. Sekretariat, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bidang Investasi, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
4. Bidang Pengolahan Data Informasi, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
5. Bidang Promosi Penanaman Modal, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
6. Bidang Pelayanan Perizinan, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;

7. Bidang Pengendalian dan Pengawasan, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
8. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
9. UPT.

Gambar 2.1.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA SAMARINDA**



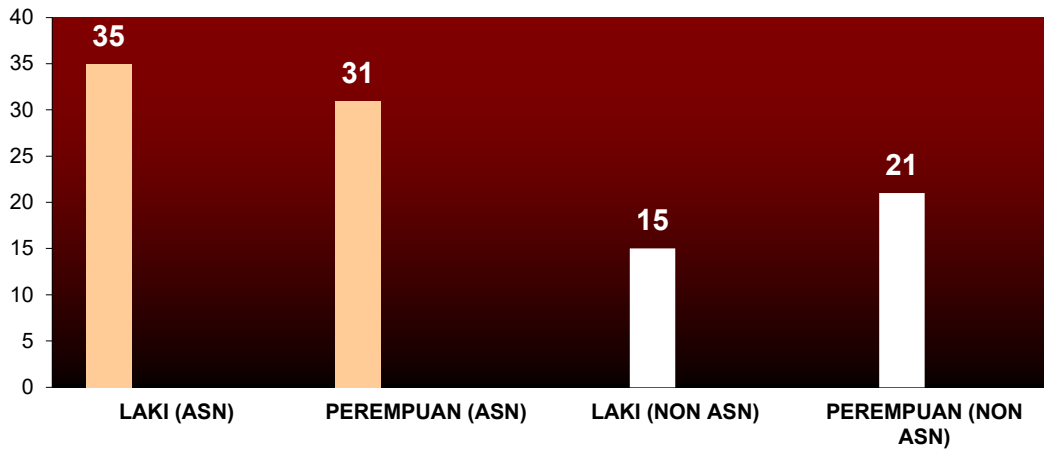
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Manusia / Kepegawaian

Dalam Rangka menjalankan kegiatan administrasi dan operasionalnya, DPMPTSP Kota Samarinda sudah didukung oleh aparatur pelayanan penanaman modal dengan jumlah personil sebanyak 102 orang terdiri dari 66 orang Aparatur Sipil Negara dan 36 Orang Non ASN yang merupakan Tenaga Honorer/ PTTB dan PTHH dengan rincian sebagai berikut:



Grafik 2.1
Jumlah personil DMPTSP



Tabel 2.1
Profil Sumber Daya Manusia DPMPTSP Kota Samarinda

No.	JABATAN	ESELON				GOLONGAN				TINGKAT PENDIDIKAN				
		I	II	III	IV	IV	III	II	I	S2	S1	D3/D2	D1	SMA
1.	Kepala DPMPTSP		1			1				1				
2.	sekretaris			1		1				1				
	- Kasubag. Umum dan Kepegawaian				1		1			1				
	- Staff ASN						4	8		2	3	1		6
	- Non ASN										11			4
3.	Kepala Bidang Investasi			1			1			1				
	- Staff ASN						2	3			2			3
	- Non ASN										4			1
4.	Kepala Bidang Pengolahan Data Informasi			1		1				1				
	- Staff ASN						2	2			3			1
	- Non ASN										3	1		3
5.	Kepala Bidang			1		1				1				



	Promosi												
	Penanaman Modal												
	- Staff ASN					4	3		1	3			3
	- Non ASN									1			
6.	Kepala Bidang Pelayanan Perizinan			1		1				1			
	- Staff ASN					4	4			3	1		4
	- Non ASN									2	2		2
7.	Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan			1		1				1			
	- Staff ASN					2	4			2			4
	- Non ASN									1			2
8.	Jabatan Fungsional					4	11			7	8		

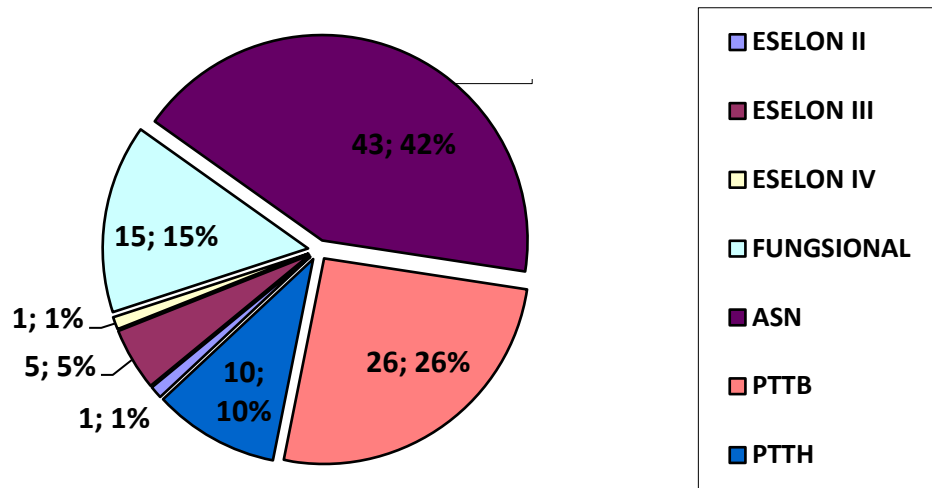
Tabel 2.2

Jumlah personil berdasarkan Eselon / Non Eselon

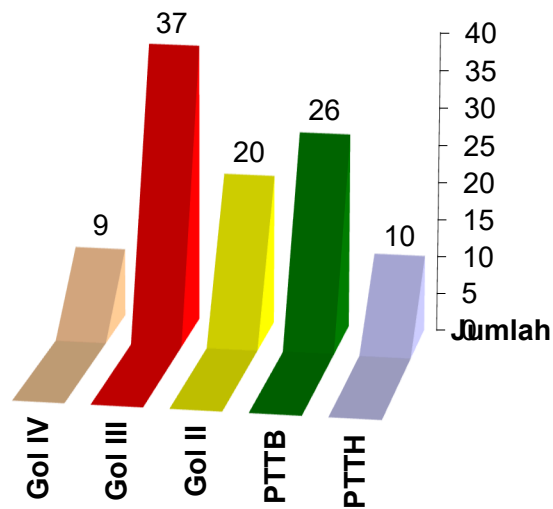
No.	Eselon / Non Eselon	Jabatan	Jumlah
1.	Eselon II	Kepala Dinas	1 Orang
2.	Eselon III	Sekretaris	1 Orang
3.	Eselon III	Kepala Bidang	5 Orang
5.	Eselon IV	Kasubbag Umum	1 Orang
6.	Fungsional	Jabatan Fungsional	15 Orang
7.	Non Eselon	Staf	43 Orang
8.	PTTB	Staf	26 Orang
9.	PTTH	Staf	10 Orang
Jumlah Keseluruhan			102 Orang



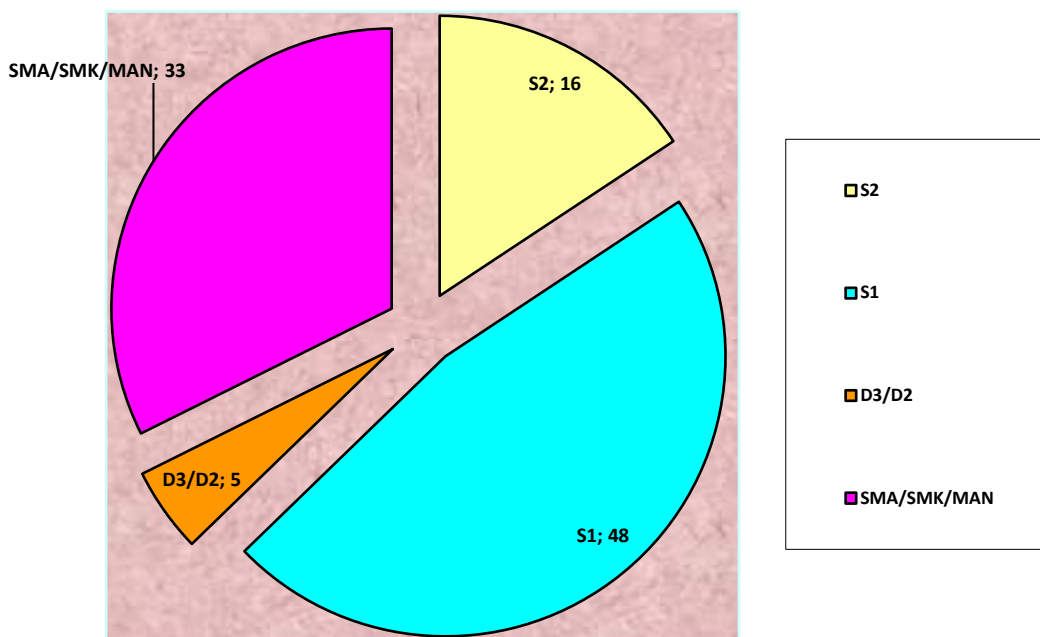
Grafik 2.2
Jumlah personil DMPTSP Berdasarkan Eselon



Grafik 2.3
Jumlah personil DPMPTSP Berdasarkan Golongan



Grafik 2.4
Jumlah personil DPMPTSP Berdasarkan Tingkat Pendidikan



2.2.1. Sarana dan Prasarana Perkantoran

Untuk mendukung pelaksanaan kinerja, DPMPTSP Kota Samarinda memiliki sarana dan prasarana sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Kerja

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah
1	Air Conditioner	Unit	10
2	Mesin Penghacur Kertas	Unit	2
2	Alat peraga (Neon Box & Pigura)	Unit	11
3	Alat Ukur	Unit	19
4	Audio visual Logitech	Unit	1
5	Bagunan Gedung Kantor	Unit	2
6	Board Display	Unit	4
7	Brankas	Unit	5
8	Camera video, digital, film	Unit	5
9	Caption Generator	unit	1
10	Computer Compatible	Unit	27



11	CPU	Unit	29
12	Facsimile	Unit	1
13	Kursi kerja	Unit	129
14	Meja kerja	Unit	106
15	Laptop	Unit	21
16	LCD Projector/Infocus	Unit	1
17	Lemari besi dan Kayu	Unit	100
18	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	Unit	21
19	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Unit	128
20	Mesin Absensi	Unit	1
21	Mesin Fotocopy Folio Canon / iR 2420L	Unit	1
22	Monitor	Unit	10
23	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Unit	18
24	Kendaraan Operasional Roda 4	Unit	4
25	Kendaraan Operasional Roda 2	Unit	5
26	ServerASUS / RS520-E9/RS8	Unit	1
27	Wheel Chair (Alat Kesehatan Rehabilitasi	Unit	1
28	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Unit	46
29	Router (MIKROTIK / ROUTERBOARD)	Unit	3

Secara umum, untuk saat ini Sumber Daya Aset yang dimiliki oleh DPMPTSP Kota Samarinda, sudah memadai dan memenuhi Standar Pelayanan Publik untuk pelayanan penanaman modal dan pelayanan perizinan.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda merupakan Organisasi Perangkat Daerah penyelenggara Pelayanan Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu dengan komitmen memberikan Pelayanan Prima sesuai dengan moto layanan “CERIA” yaitu Cepat, Efektif, Ramah, Inovatif, dan Amanah.

Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) terinci pada tabel dibawah ini:



Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Samarinda

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Indikator Makro																			
1	Nilai Investasi	-	Realisasi Nilai Investasi	-	7,9 T	9 T	9,3 T	9,6 T	9,9 T	1,6 T	7,05 T	8,1 T	10,4 T	930 M	0,2	0,7	0.8	1.08	0.09
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	Nilai Survei Indeks Kepuasan Masyarakat	-	88	89	90	90,5	91	87,1	90,3	92,2	90,9	88,2	0.9	1.01	1.02	1	0.9
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																			
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	-	Tagihan rekening yang dibayarkan	-	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	1	1	1	1	1
2	Penyediaan Alat Tulis kantor	-	Jenis alat tulis kantor	-	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	1	1	1
3	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-	laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	1	1	1	1
4	Penyediaan Komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan	-	jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1
5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1



No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
6	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-	Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1	1	1	1	1
7	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	-	PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya.	-	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	1	1	1	1	1
Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur																			
1	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	-	Persentase gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	1	1	1	1
2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-	Persentase kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	1	1	1	1
3	Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan dan peralatan kantor	-	Persentase perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	1	1	1	1
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan																			
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Renstra, Renja, RKT, IKU, RKA, AKIP, LAKIP)	-	Dokumen SAKIP	-	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	1	1	1	1	1



No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Program peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi																		
1	Promosi Investasi dalam wilayah Kalimantan Timur, Dalam dan Luar Negeri	-	Event Promosi Investasi	-	1	5	4	4	4	1	5	4	6	3	1	1	1	1,5	0,7
2	Kerjasama Non Pameran Dalam dan Luar Negeri melalui Seminar, Konferensi, Lokakarya, dan Temu Usaha	-	Event Seminar, Konferensi, Lokakarya, Temu Usaha	-	0	0	0	1	1	0	0	0	3	1	0	0	0	3	1
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi																		
1	Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan dan Penanaman Modal	-	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1	1	1	1	1
2	Peningkatan Pelayanan dan Informasi Perijinan Daerah	-	Pemohon Izin yang dilayani	-	5000	5100	5200	5300	5400	5013	5184	5222	6427	4358	1	1	1	1,2	0,8
3	Pengembangan Potensi Unggulan dan Kajian Calon Investor	-	Dokumen Potensi Unggulan	-	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
4	Koordinasi, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Investasi	-	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, monitoring, evaluasi	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Investasi																
5	Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan dan Sistem Informatika Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan di Kota Samarinda	-	Tersedianya Jaringan dan Sistem Informasi Penanaman Modal di Kota Samarinda	-	5	6	7	8	9	5	6	7	8	9	1	1	1	1	1
Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah																			
1	Penyusunan Peta Potensi Investasi Penanaman Modal di Kota Samarinda	-	Peta Potensi Investasi Penanaman Modal di Kota Samarinda	-	0	0	3	7	1	0	0	3	7	1	0	0	1	1	1



Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda Tahun 2016-2020

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.454.400.000	2.127.200.000	2.156.075.000	2.485.309.000	2.575.759.000	1.421.513.000	2.073.753.000	2.090.404.000	2.124.672.000	2.373.245.000	97,7	97,4	96,9	85,4	92,1	16,63	15,01
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	165.195.000	256.870.000	130.870.000	126.870.000	218.431.000	119.091.000	191.513.000	78.211.000	69.714.000	102.585.000	72,09	74,5	59,7	54,9	46,9	18,89	9,48
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	0	0	75.000.000	125.000.000	100.000.000	0	0	74.738.000	124.973.000	99.765.000	0	0	99,6	99,9	99,7	11,67	11,76
Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	175.000.000	503.500.000	500.000.000	734.000.000	884.000.000	175.000.000	503.500.000	483.851.000	717.317.000	823.784.000	100	100	96,7	97,7	93,1	63,56	61,73
Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah	0	0	291.922.000	553.000.000	200.000.000	0	0	280.888.000	526.581.000	121.011.000	0	0	96,2	95,2	60,5	6,40	2,61
Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	105.000.000	300.000.000	605.000.000	1.456.460.000	1.785.000.000	105.000.000	296.857.000	602.824.000	1.395.850.000	1.597.299.000	100	98,9	99,6	95,8	89,48	112,67	107,94



2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

2.4.1 Analisis Lingkungan Internal

Dari hasil observasi terhadap lingkungan internal Pemerintah Kota Samarinda, diperoleh suatu gambaran kondisi tentang kekuatan maupun kelemahan, sebagaimana dijelaskan berikut ini.

a) Kekuatan (Strengths)

1. Tupoksi dan kerjasama Instansi umumnya terdapat keterkaitan dalam mewujudkan investasi dan pemasaran komoditi/potensi;
2. Sumber Daya Manusia dilingkungan DPMPTSP mendukung peningkatan investasi dan promosi kerjasama investasi serta peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu;
3. Luas dan Kondisi Wilayah pemanfaatan investasi dan Penanaman Modal pada umumnya sangat terdukung.

b) Kelemahan (Weakness)

1. Database dan optimalisasi data link internet secara umum belum optimal;
2. Optimalisasi Program dan Kegiatan Penguatan kelembagaan dan Kinerja organisasi secara umum kurang terwujud;
3. Rancangan Revitalisasi dan Tata ruang Investasi/Penanaman Modal Belum terwujud;
4. Pencapaian program Peningkatan Iklim investasi, Pemasaran produk unggulan, pengembangan pajak dan perizinan, dan pengembangan budidaya dan produk komoditi/potensi investasi kurang terakses;
5. Penyiapan dan Penyusunan Kebijakan Pengembangan Investasi sangat lamban
6. Iklim dan Akses Pengembangan Kerjasama Investasi/Penanaman Modal secara umum kurang di dukung.

2.4.2 Analisis Lingkungan Eksternal

Dari hasil obervasi terhadap lingkungan Eksternal Pemerintah Kota Samarinda pada umumnya, diperoleh suatu gambaran kondisi tentang peluang maupun tantangan, sebagaimana dijelaskan berikut ini.



a) Peluang (Opportunities)

1. Kawasan-kawasan investasi dan lingkup organisasi bisnis di berbagai wilayah pada umum semakin bertambah dan mudah diakses;
2. Jaringan Kerjasama investasi dalam negeri semakin terbuka bagi PMA maupun PMDN dan pada umumnya dapat diakses;
3. Pertumbuhan Lembaga keuangan dan Bank semakin berkembang dan sangat menunjang;
4. Penerapan Jaringan komunikasi dan teknologi informasi semakin meluas dan berperan dalam dunia e-commers dan bisnis investasi;
5. Sumber Daya dan potensi alam dalam peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi;
6. Komitmen Pemerintah Kota Samarinda untuk terus berupaya meningkatkan Kepuasan Masyarakat dengan menyelenggarakan pelayanan perizinan yang mudah, murah, cepat, efektif, efisien, dan akuntabel.
7. Situasi keamanan dan ketertiban Kota Samarinda yang kondusif.

b) Tantangan (Threats)

1. Database dan optimalisasi data link internet secara umum belum terwujud;
2. Optimalisasi Program dan Kegiatan Penguatan kelembagaan dan Kinerja organisasi secara umum kurang terwujud;
3. Rancangan Revitalisasi dan Tataruang Investasi/Penanaman Modal Belum terwujud;
4. Pencapaian program Peningkatan Iklim investasi, Pemasaran produk unggulan, pengembangan pajak dan perizinan, dan pengembangan budidaya dan produk komoditi/potensi investasi kurang terakses;
5. Penyiapan dan Penyusunan Kebijakan Pengembangan Investasi sangat lamban
6. Iklim dan Akses Pengembangan Kerjasama Investasi/Penanaman Modal secara umum kurang di dukung.
7. Pelimpahan sebagian kewenangan perizinan yang belum utuh sehingga menghambat akuntabilitas pelayanan publik.
8. Kualitas Aparatur pelayanan perizinan yang perlu ditingkatkan, mengingat Peraturan mengenai perizinan selalu berubah mengikuti perkembangan zaman.
9. Sarana dan Prasarana yang perlu ditingkatkan demi peningkatan kualitas pelayanan.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh DPMPTSP Kota Samarinda adalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya minat Investor untuk berinvestasi di Kota Samarinda.
2. Belum optimalnya pelayanan penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan.

3.2. Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang sesuai dengan amanat UUD 1945, maka Pemerintah Daerah diharapkan dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, sebagai upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun Visi Walikota dan Wakil Walikota sebagai Kepala Daerah Terpilih dalam Pembangunan Kota Samarinda Tahun 2021 - 2026 adalah :

“ TERWUJUDNYA SAMARINDA SEBAGAI KOTA PUSAT PERADABAN ”

Dalam mewujudkan visi tersebut, akan ditempuh melalui 5 (lima) Misi Pembangunan Kota Samarinda Tahun 2021 - 2026, Yaitu :

1. Mewujudkan masyarakat kota yang religius, unggul dan berbudaya;
2. **Mewujudkan perekonomian kota yang maju, mandiri, berkerakyatan dan berkeadilan;**
3. **Mewujudkan pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel dan bebas korupsi;**
4. Mewujudkan infrastruktur yang mantap dan modern.



5. Mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, harmoni dan lestari
Adapun yang menjadi fokus DPMPTSP Kota Samarinda adalah misi ke-2 misi dan misi ke-3.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi

A. Telaahan Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal

Berdasarkan amanat peraturan dan undang – undang terhadap tugas dan fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), visi BKPM adalah sebagai berikut :

BKPM yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong.”

Sesuai dengan visi 2020-2024, maka misi BKPM yang mengacu pada 2 (dua) dari 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden, sebagai berikut :

1. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
2. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya.

Dengan mempertimbangkan potensi dan permasalahan yang akan dihadapi serta dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden, maka tujuan BKPM Tahun 2020-2024, yaitu:

1. Terwujudnya peningkatan daya saing penanaman modal untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal; serta
2. Terwujudnya tata kelola dan penguatan kelembagaan untuk mendukung pelayanan publik yang prima.

B. Telaahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur

Adapun Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 adalah :

“Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat.”

Dalam rangka mewujudkan visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur 2018-2023, ditetapkan misi pembangunan dalam lima tahun mendatang yaitu:

1. Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas;



2. Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan;
3. Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan;
4. Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan;
5. Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana tata ruang wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman didalam melaksanakan kegiatan yang menggunakan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Penerapan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) dalam penataan ruang juga bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) serta instrumen pengelolaan lingkungan lainnya, menciptakan tata pengaturan yang lebih baik melalui pembangunan keterlibatan para pemangku kepentingan yang strategis dan partisipatif, kerjasama lintas batas wilayah administrasi, serta memperkuat pendekatan kesatuan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Samarinda Tahun 2014-2034, adapun tujuan Penataan Ruang adalah untuk mewujudkan Kota Samarinda menjadi kota tepian yang berbasis perdagangan, jasa dan industri yang maju, berwawasan lingkungan dan hijau, serta mempunyai keunggulan daya saing untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun Kebijakan Penataan Ruang Meliputi :

1. Meningkatkan akses pelayanan regional dan internasional sebagai Pusat Kegiatan Nasional yang merupakan bagian dari kawasan perkotaan Balikpapan - Tenggarong - Samarinda - Bontang dan sebagai bagian dari Kapet Sasamba.
2. Perwujudan pusat-pusat pelayanan kota yang bersinergi, efektif, dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi daerah sebagai kota tepian.
3. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan infrastruktur perkotaan yang terpadu dan merata di seluruh wilayah kota.
4. Peningkatan peran kota tepian yang ditunjang oleh kegiatan industri, pertanian, perikanan, perdagangan/jasa, dan pariwisata.
5. Pemantapan kelestarian kawasan lindung untuk mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan.



6. Pengembangan kegiatan budidaya untuk mendukung pelaksanaan pembangunan kota yang berwawasan lingkungan dan hijau, serta mempunyai keunggulan daya saing untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
7. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, Isu strategis jangka menengah DPMPTSP Kota Samarinda adalah sebagai berikut:

1. Potensi Kota Samarinda sebagai Kota Jasa dan Perdagangan;
2. Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
3. Penerapan OSS.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Dalam mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Perumusan tujuan dan sasaran DPMPTSP Kota Samarinda Tahun 2021-2026 dikelompokkan berdasarkan Misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

Tujuan jangka menengah DPMPTSP Kota Samarinda tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Meningkatnya Nilai Investasi;

Sedangkan Sasaran dari Tujuan Jangka Menengah yaitu :

1. Meningkatkan Realisasi Investasi;
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah DPMPTSP Kota Samarinda kinerjanya disajikan pada Tabel berikut ini :

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMPTSP Kota Samarinda tahun 2021-2026

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	REALISASI & TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				REALISASI		TARGET			
				1	2	3	4	5	6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatnya Nilai Investasi	Meningkatkan Realisasi Investsai	Nilai Realisasi Investasi	Rp. 835.588.300. 000	Rp. 1.737.419.619. 798	Rp. 2.100.000.000. .000	Rp. 3.000.000.000. .000	Rp. 3.600.000.000. .000	Rp. 4.200.000.000. .000
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan non Perizinan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	89	90	91	91.5	92	92.5



BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, DPMPTSP Kota Samarinda memiliki Strategi dan yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran, yaitu sebagai berikut:

1. Peningkatan Kebijakan Penanaman Modal dengan menciptakan Iklim Investasi yang kondusif dan dapat menarik minat Investor;
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan yang Profesional.

Sedangkan Arah kebijakan yang ditempuh oleh DPMPTSP Kota Samarinda adalah sebagai berikut:

1. Memberikan kemudahan bidang Penanaman Modal dan Percepatan Berusaha;
2. Memberikan Kepastian Hukum dan kemudahan dalam Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : “TERWUJUDNYA SAMARINDA SEBAGAI KOTA PUSAT PERADABAN”			
MISI II : Mewujudkan perekonomian kota yang maju, mandiri, berkerakyatan dan berkeadilan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Nilai Investasi	Meningkatkan Realisasi Investsai	Peningkatan Kebijakan Penanaman Modal dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif dan dapat menarik minat Investor	Memberikan Kemudahan bidang Penanaman Modal dan Percepatan Berusaha
MISI III : Mewujudkan pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel dan bebas korupsi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Nilai Investasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan non Perizinan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan yang Profesional	Memberikan Kepastian Hukum dan Kemudahan dalam Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif

Rencana program prioritas selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan jangka menengah DPMPTSP yang telah ditetapkan. Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DPMPTSP Kota Samarinda tahun 2021-2026 sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah meliputi:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1.1 Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 1.1.3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 1.2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- 1.2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- 1.3.1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- 1.3.2 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- 1.3.3 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD

1.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 1.4.1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
- 1.4.2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan
- 1.4.3 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian



- 1.4.4 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
- 1.4.5 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- 1.4.6 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 1.4.7 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

1.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1.5.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 1.5.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 1.5.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 1.5.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 1.5.5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 1.5.6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 1.5.7 Penyediaan Bahan/Material
- 1.5.8 Fasilitasi Kunjungan Tamu
- 1.5.9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 1.5.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

1.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1.6.1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 1.6.2 Pengadaan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan
- 1.6.3 Pengadaan Mebel
- 1.6.4 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 1.6.5 Pengadaan Aset Tetap Lainnya
- 1.6.6 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 1.6.7 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1.7.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 1.7.2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 1.7.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1.8.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 1.8.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan



- 1.8.3 Pemeliharaan Mebel
- 1.8.4 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 1.8.5 Pemeliharaan Aset tetap lainnya
- 1.8.6 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 1.8.7 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 1.8.8 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

2.1 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

- 2.1.1 Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
- 2.1.2 Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
- 2.1.3 Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

2.2 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota

- 2.2.1 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
- 2.2.2 Pemutakhiran Data Potensi Investasi Daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)
- 2.2.3 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

3. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL

3.1 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

- 3.1.1 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
- 3.1.2 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota

4. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

4.1 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

- 4.1.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah



- 4.1.2 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
- 4.1.3 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko
- 4.1.4 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko

5. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

5.1 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

- 5.1.1 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya
- 5.1.2 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha
- 5.1.3 Pengawasan Penanaman Modal

6. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

6.1 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- 6.1.1 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Berikut adalah Tabel Program dan Kegiatan Prioritas Renstra DPMPTSP Kota Samarinda Tahun 2021-2026.



Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatorif Tahun 2021-2026
DPMPTSP Kota Samarinda

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Meningkatnya Nilai Investasi	Meningkatkan Realisasi Investsai	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Regulasi Yang Mendukung Investasi	-	-	64.990.000	1	950.000.000	1	1.154.258.000	1	1.479.869.000	2	1.506.265.000	2	1.224.549.000	DPM PTSP	Smd
		2 18 02 2.01	1. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perda	-	-	64.990.000	1	350.000.000	0	300.234.000	0	450.234.000	0	450.234.000	1	1.200.702.000	DPM PTSP	Smd
		2 18 02 2.01 0001	1.1 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	-	-	0	1	200.000.000	0	-	0	-	0	-	1	-	DPM PTSP	Smd
		2 18 02 2.01 0003	1.2 Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	-	-	0	0	0	0	0	5	150.000.000	5	150.000.000	50	150.000.000	DPM PTSP	Smd
		2 18 02 2.01 0004	1.2 Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	-	-	0	0	0	20	300.234.000	20	300.234.000	20	300.234.000	50	300.234.000	DPM PTSP	Smd



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		2.18.02.2.02	2. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen	1	1	0	2	600.000.000	2	854.024.000	2	879.635.000	2	906.031.000	2	906.031.000	DPM PTSP	Smd
		2.18.02.2.02.0001	2.1 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota			64.990.000	1	200.000.000	1	259.920.000	1	267.710.000	1	275.749.000	1	275.749.000	DPM PTSP	Smd
		2.18.02.2.02.0003	2.2 Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	0	0	0	0	0	0	0	1	150.000.000	1	150.000.000	1	300.000.000	DPM PTSP	Smd
		2.18.02.2.02.0004	2.3 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			0	1	400.000.000	1	594.104.000	1	611.925.000	1	630.282.000	4	630.282.000	DPM PTSP	Smd
		2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor	2	5	451.289.000	200	700.000.000	225	947.637.000	250	970.909.000	275	995.496.000	275	995.496.000	DPM PTSP	Smd
		2.18.03.2.01	1. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi yang diselenggarakan	4	3	451.289.000	2	700.000.000	3	947.637.000	4	970.909.000	5	995.496.000	5	995.496.000	DPM PTSP	Smd
		2.18.03.2.01.0002	1.1 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	4	2	386.144.000	2	500.000.000	4	730.980.000	4	752.909.000	5	775.496.000	5	775.496.000	DPM PTSP	Smd
		2.18.03.2.01.0003	1.2 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	-	-	65.145.000	1	200.000.000	1	216.657.000	1	218.000.000	1	220.000.000	1	220.000.000	DPM PTSP	Smd



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan non Perizinan		2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	88	91	550.000.000	91	550.000.000	91,5	1.285.746.000	92	1.324.317.000	92,5	1.364.046.000	92,5	1.364.046.000	DPM PTSP	Smd
		2.18.04.2.01	1. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang patuh terhadap kewajiban Perizinan Berusaha	2212	2418	172.992.900	2600	550.000.000	2650	1.285.746.000	2700	1.324.317.000	2750	1.364.046.000	2750	1.364.046.000	DPM PTSP	Smd
		2 18 04 2.01 0005	1.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	0	-	100	400.000.000	125	412.000.000	150	424.360.000	150	424.360.000	DPM PTSP	Smd
		2 18 04 2.01 0006	1.2 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	5012	5173	172.992.900	5200	300.000.000	5300	334.078.000	5400	344.100.000	5500	354.423.000	5500	354.423.000	DPM PTSP	Smd
		2 18 04 2.01 0007	1.3 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi	40	40	0	40	150.000.000	40	286.443.000	40	295.036.000	40	303.887.000	40	303.887.000	DPM PTSP	Smd



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			berusaha berbasis risiko	Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik															
		2 18 04 2.01 0008	1.4 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	-	-	-	220	100.000.000	240	265.225.000	260	273.181.000	280	281.376.000	280	281.376.000	DPM PTSP	Smd
		2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Pelaku Usaha Yang Melapor LKPM	300	300	393.524.500	300	623.400.000	300	376.619.000	300	387.916.000	300	399.553.000	300	399.553.000	DPM PTSP	Smd
		2.18.05.2.01	1. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian	200	200	393.524.500	300	623.400.000	300	376.619.000	300	387.916.000	300	399.553.000	300	399.553.000	DPM PTSP	Smd
		2 18 05 2.01 0004	1.1 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	50	100	14.491.500	50	125.000.000	50	164.439.000	50	169.372.000	50	174.453.000	50	174.453.000	DPM PTSP	Smd



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		2.18.05.2.01.0005	1.2 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	50	50	269.850.500	50	398.400.000	70	106.090.000	70	109.272.000	70	112.550.000	70	112.550.000	DPM PTSP	Smd
		2.18.05.2.01.0006	1.3 Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	50	100	109.182.500	100	100.000.000	200	106.090.000	200	109.272.000	200	112.550.000	200	112.550.000	DPM PTSP	Smd
		2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah Pengguna Layanan Data	4083	4150	496.238.850	4100	500.000.000	4200	408.446.000	4300	420.699.000	4400	433.320.000	4400	433.320.000	DPM PTSP	Smd



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		2.18.06.2.01	1. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sistem Aplikasi	1	2	496.238.850	2	500.000.000	2	408.446.000	2	420.699.000	2	433.320.000	2	433.320.000	DPM PTSP	Smd
		2.18.06.2.01.0002	1.1 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	4120	4250	496.238.850	5000	500.000.000	5000	408.446.000	5000	420.699.000	5000	433.320.000	5000	433.320.000	DPM PTSP	Smd
		2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai IKM	88	89	21.731.277.282	87,5	21.206.788.156	88	24.630.539.600	88,5	26.056.322.600	89	28.074.310.600	89	27.974.310.600	DPM PTSP	Smd
		2.18.01.2.01.	1. Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	77	78	68.130.000	80	80.000.000	80,5	100.000.000	81	100.000.000	81,5	100.000.000	81,5	100.000.000	DPM PTSP	Smd
		2.18.01.2.01.0001	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	32.720.000	7	50.000.000	7	50.000.000	7	50.000.000	7	50.000.000	7	50.000.000	DPM PTSP	Smd
		2.18.01.2.01.0006	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	1 Dokumen	1 Dokumen	35.410.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	DPM PTSP	Smd



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
		2.18.01.2.01.0007	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	0	1	-	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	DPM PTSP	Smd
		2.18.01.2.02	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	2 Laporan	2 Laporan	13.538.537.949	3	13.733.828.223	3	14.901.435.000	3	17.008.081.000	3	17.311.807.000	3	17.311.807.000	DPM PTSP	Smd
		2.18.01.2.02.0001	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74 Orang	74 Orang	12.301.410.949	74	12.417.101.223	74	13.601.983.000	74	15.381.222.000	74	15.584.217.000	74	15.584.217.000	DPM PTSP	Smd
		2.18.01.2.02.0002	- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48 Orang	48 Orang	1,199,859,000	1	1.291.727.000	1	1.272.930.000	1	1.599.859.000	1	1.699.590.000	1	1.699.590.000	DPM PTSP	Smd
		2.18.01.2.02.0005	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	0	1	25.000.000	1	26.522.000	1	27.000.000	1	28.000.000	1	28.000.000	DPM PTSP	Smd
		2.18.01.2.03	3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	-	-	0	1	25.000.000	3	75.000.000	3	75.000.000	3	75.000.000	3	75.000.000	DPM PTSP	Smd
		2.18.01.2.03.0001	- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	0	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	DPM PTSP	Smd



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		2.18.01.2.03.0002	- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	0	0	-	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	DPM PTSP	Smd
		2.18.01.2.03.0004	- Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	0	0	-	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	DPM PTSP	Smd
		2.18.01.2.05	5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai	121 Orang	121 Orang	0	121	282.000.000	115	912.917.000	115	917.054.000	115	921.316.000	115	921.316.000	DPM PTSP	Smd
		2.18.01.2.05.0001	- Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	121 Orang	121 Orang	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	DPM PTSP	Smd
		2.18.01.2.05.0002	- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	-	0	73	82.000.000	115	137.917.000	115	142.054.000	115	146.316.000	115	146.316.000	DPM PTSP	Smd
		2.18.01.2.05.0003	- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	-	0	0	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	DPM PTSP	Smd
		2.18.01.2.05.0004	- Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	-	-	0	0	-	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	DPM PTSP	Smd
		2.18.01.2.05.0005	- Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	-	0	0	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	DPM PTSP	Smd
		2.18.01.2.05	- Pendidikan dan	Jumlah Pegawai	-	-	0	0	-	30	300.000.000	30	300.000.000	30	300.000.000	30	300.000.000	DPM PTSP	Smd



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab	Lokasi	
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD				
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
		0009	Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan																
		2.18.01.2.05.0011	- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	0	10	200.000.000	30	300.000.000	30	300.000.000	30	300.000.000	30	300.000.000		DPM PTSP	Smd
		2.18.01.2.06	6. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	7 Laporan	7 Laporan	1.658.258.000	10	1.704.021.000	10	1.946.000.000	10	2.071.000.000	10	2.196.000.000	10	2.196.000.000		DPM PTSP	Smd
		2.18.01.2.06.0001	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	51.686.000	3	71.686.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000		DPM PTSP	Smd
		2.18.01.2.06.0002	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	5 Paket	873.000.000	10	915.000.000	5	500.000.000	5	500.000.000	5	500.000.000	5	500.000.000		DPM PTSP	Smd
		2.18.01.2.06.0003	- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	-	0	0	-	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000		DPM PTSP	Smd
		2.18.01.2.06.0004	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	183.750.000	3	26.763.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000		DPM PTSP	Smd
		2.18.01.2.06.0005	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	311.250.000	5	430.000.000	5	483.000.000	5	483.000.000	5	483.000.000	5	483.000.000		DPM PTSP	Smd



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		2.18.01.2.06.0006	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan	1 Dokumen	2 Dokumen	39.600.000	3	39.600.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	DPM PTSP	Smd
		2.18.01.2.06.0007	- Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	-	0	0	-	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	DPM PTSP	Smd
		2.18.01.2.06.0008	- Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	20 Laporan	24 Laporan	0	10	22.000.000	15	58.000.000	15	58.000.000	15	58.000.000	15	58.000.000	DPM PTSP	Smd
		2.18.01.2.06.0009	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 Laporan	12 Laporan	198.972.000	10	198.972.000	20	500.000.000	22	600.000.000	24	700.000.000	24	700.000.000	DPM PTSP	Smd
		2.18.01.2.06.0010	- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-	0	0	-	700	125.000.000	800	150.000.000	900	175.000.000	900	175.000.000	DPM PTSP	Smd
		2.18.01.2.07	7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	2 Laporan		0	7	1.368.000.000	7	2.510.000.000	7	1.510.000.000	7	2.910.000.000	7	2.910.000.000	DPM PTSP	Smd
		2.18.01.2.07.0001	- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	-	0	1	100.000.000	7	700.000.000	7	700.000.000	7	700.000.000	7	700.000.000	DPM PTSP	Smd
		2.18.01.2.07.0002	- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	-	0	0	-	0	-	0	-	4	400.000.000	4	400.000.000	DPM PTSP	Smd
		2.18.01.2.07.0005	- Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 Paket	-	0	3	118.000.000	2	60.000.000	2	60.000.000	2	60.000.000	2	60.000.000	DPM PTSP	Smd



Perubahan Rencana Strategis
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		2.18.01.2.07.0006	- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	-	0	3	1.150.000.000	1	500.000.000	0	-	1	500.000.000	1	500.000.000	DPM PTSP	Smd
		2.18.01.2.07.0007	- Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	-	-	0	0	-	1	500.000.000	0	-	1	500.000.000	1	500.000.000	DPM PTSP	Smd
		2.18.01.2.07.0010	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	0	0	-	5	500.000.000	5	500.000.000	5	500.000.000	5	500.000.000	DPM PTSP	Smd
		2.18.01.2.07.0011	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	0	0	-	5	250.000.000	5	250.000.000	5	250.000.000	5	250.000.000	DPM PTSP	Smd
		2.18.01.2.08	8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Jasa	3 Laporan	3 Laporan	2.982.994.333	3 Laporan	1.952.001.000	3 Laporan	2.028.700.000	3 Laporan	2.078.700.000	3 Laporan	2.128.700.000	3 Laporan	10.116.801.000	DPM PTSP	Smd
		2.18.01.2.08.0002	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	1.928.700.000	3	2.794.651.333	3	2.650.000.000	3	2.815.000.000	3	2.975.000.000	3	2.875.000.000	DPM PTSP	Smd
		2.18.01.2.08.0003	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	80.000.000	3	1.109.571.333	3	850.000.000	3	900.000.000	3	950.000.000	3	950.000.000	DPM PTSP	Smd
		2.18.01.2.08.0004	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	1 Laporan	2 Laporan	1.763.423.000	2	80.000.000	1	100.000.000	1	115.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000	DPM PTSP	Smd



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Umum Kantor yang Disediakan															
		2.18.01.2.09	9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pemeliharaan	3 Laporan	4 Laporan	3.483.357.000	4	1.219.287.600	8	1.535.187.600	8	1.560.187.600	8	1.585.187.600	8	1.585.187.600	DPM PTSP	Smd
		2.18.01.2.09.0001	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	8 Unit	288.480.300	6	258.480.300	6	268.480.300	6	278.480.300	6	288.480.300	6	288.480.300	DPM PTSP	Smd
		2.18.01.2.09.0002	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	7 Unit	166.707.300	6	156.707.300	6	166.707.300	6	176.707.300	6	186.707.300	6	186.707.300	DPM PTSP	Smd
		2.18.01.2.09.0005	- Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-	-	0	0	-	2	45.000.000	2	50.000.000	3	55.000.000	3	55.000.000	DPM PTSP	Smd
		2.18.01.2.09.0006	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	5 Unit	217.390.000	3	217.390.000	2	250.000.000	2	250.000.000	2	250.000.000	2	250.000.000	DPM PTSP	Smd
		2.18.01.2.09.0007	- Pemeliharaan Aset tetap lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	-	-	0	0	-	1	55.000.000	1	55.000.000	1	55.000.000	1	55.000.000	DPM PTSP	Smd
		2.18.01.2.09.0009	- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Gedung	1 Gedung	2.810.779.400	1	586.710.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	DPM PTSP	Smd



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		2.18.01.2.09.0010	- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	0	0	-	5	250.000.000	5	250.000.000	5	250.000.000	5	250.000.000	DPM PTSP	Smd
		2.18.01.2.09.0011	- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 jenis	-	0	0	-	5	250.000.000	5	250.000.000	5	250.000.000	5	250.000.000	DPM PTSP	Smd



BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Indikator kinerja DPMPTSP Kota Samarinda tahun 2021-2026 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Samarinda adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai DPMPTSP Kota Samarinda tahun 2021-2026 dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026. Indikator kinerja DPMPTSP Kota Samarinda yang mengacu pada tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026 ini menjadi tolok ukur kinerja dalam evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di DPMPTSP Kota Samarinda. Indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur.

Sebagaimana tercantum dalam Perubahan RPJMD, indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda tahun 2021-2026 yang mengacu pada tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Nilai Realisasi Investasi	Rp. 835.588.300. 000	Rp. 1.737.419.619. 798	Rp. 2.100.000.000. 000	Rp. 3.000.000.000. 000	Rp. 3.600.000.000. 000	Rp. 4.200.000.000. 000	Rp. 4.200.000.000. 000
2	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	89	90	91	91.5	92	92.5	92.5



BAB VIII PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda tahun 2021-2026 merupakan rencana pembangunan selama 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi kebijakan, program dan kegiatan. Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda berpedoman pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda Tahun 2021-2026 dan bersifat indikatif. Renstra dimaksudkan untuk memberi arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh DPMPTSP Kota Samarinda dalam kurun waktu lima tahun.

Kaidah pelaksanaan yang perlu diatur dalam pelaksanaan Perubahan Renstra DPMPTSP Kota Samarinda tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Seluruh unit dan jabatan pada DPMPTSP Kota Samarinda agar mendukung pencapaian target-target Renstra tahun 2021-2026, dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra DPMPTSP dengan sebaik-baiknya;
2. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP dalam kurun waktu 5 (lima) tahun wajib berpedoman pada Perubahan Renstra DPMPTSP Kota Samarinda tahun 2021-2026;
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Perubahan Renstra DPMPTSP Kota Samarinda tahun 2021-2026, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

Samarinda, 02 Agustus 2023
KEPALA DINAS



JUSMARANDHANA ALUS, SH, M.Si

NIP. 19711030 199403 1 002